

Identifikasi Rumah Layak Huni Perbandingan Standar dan Kondisi Faktual di Dusun Pringombo, Natah, Nglipar, Gunungkidul

*Identification of Livable Housing
Comparison of Standards and Actual Conditions in Pringombo Hamlet, Natah,
Nglipar, Gunungkidul*

Muhammad Renaldi Febriansyah^{1*}), Afriyanti²⁾, Septiono Eko Bawono³⁾

¹⁾ Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Gunung Kidul. Email:
reyfbrnsyh2823@gmail.com

²⁾ Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Gunung Kidul. Email:
afriyanti@ugk.ac.id

³⁾ Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Gunung Kidul. Email:
septiono.ekobawono@ugk.ac.id

*Corespondensi: Email: reyfbrnsyh2823@gmail.com

Received: 15/11/25; Revised: 15/12/25; Accepted: 20/12/25

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi rumah di Dusun Pringombo dan membandingkannya dengan standar rumah layak huni yang ditetapkan dalam regulasi Pemerintah UU No. 1 Tahun 2011 (Dasar hukum utama tentang rumah layak huni) dan KEPMPEN 403/KPTS/M/2002 (Standar teknis pembangunan rumah sehat). Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan di Dusun Pringombo selama periode survei pada tahun 2024, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 12 pemilik rumah yang dipilih berdasarkan kriteria kondisi rumah yang memerlukan perbaikan, khususnya pada aspek ventilasi dan struktur bangunan. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas rumah belum memenuhi standar rumah layak huni, khususnya dalam aspek keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, dan kecukupan ruang. Sebanyak 66,7% rumah memiliki tinggi atap kurang dari 3 meter, yang berpengaruh pada sirkulasi udara dan kenyamanan termal. Selain itu, sebagian besar rumah masih memiliki fasilitas kamar mandi yang tidak layak, dengan sanitasi yang tidak memenuhi standar kesehatan. Namun, aspek akses listrik dan penerimaan bantuan sosial menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mendukung masyarakat setempat. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa tantangan utama dalam mewujudkan rumah layak huni di Dusun Pringombo meliputi keterbatasan infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan kondisi geografis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang program perbaikan rumah tidak layak huni yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Rumah Layak Huni, Dusun Pringombo, Keselamatan Bangunan, Kesehatan Lingkungan, Kecukupan Ruang

Abstract

This study aims to identify the housing conditions in Pringombo Village and compare them with the standards for habitable housing as stipulated in government regulations, Law No. 1 of 2011 (the main legal basis for habitable housing) and Ministerial Decree No. 403/KPTS/M/2002 (technical standards for the construction of healthy housing). The research was conducted using a

"

qualitative descriptive approach to provide an in-depth depiction of actual conditions. Data collection took place in Pringombo Village during the 2024 survey period using interview, observation, and documentation techniques. The informants consisted of 12 homeowners selected based on criteria indicating housing conditions requiring improvement, particularly in terms of ventilation and building structure. Data were analyzed using the qualitative analysis method proposed by Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the majority of houses do not yet meet the standards for habitable housing, especially with regard to building safety, environmental health, and adequacy of space. As many as 66.7% of the houses have roof heights of less than 3 meters, which affects air circulation and thermal comfort. In addition, most houses still have inadequate bathroom facilities, with sanitation that does not meet health standards. However, access to electricity and the receipt of social assistance reflect government efforts to support the local community. This study illustrates that the main challenges in achieving habitable housing in Pringombo Hamlet include limited infrastructure, low community awareness, and geographical conditions. The findings are expected to serve as a reference for local governments in designing more effective and sustainable programs to improve substandard housing.

Keywords: Habitable Housing, Pringombo Village, Building Safety, Environmental Health, Space Adequacy

1. PENDAHULUAN

Ketersediaan rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pemerintah telah menginisiasi berbagai program untuk menyediakan perumahan yang memenuhi standar kelayakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, implementasi program ini sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan lahan, aksesibilitas, dan pemahaman masyarakat mengenai standar rumah layak huni (Sari, 2022). Dusun Pringombo yang terletak di Desa Natah, Kec. Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan terkait kualitas perumahan. Dusun Pringombo dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan survei, 12 rumah yang diteliti tergolong tidak layak huni dengan masalah utama pada struktur bangunan, ventilasi, dan sanitasi. Kondisi geografisnya yang berbukit juga menjadi tantangan dalam pembangunan rumah yang aman. Selain itu, penelitian tentang rumah layak huni di daerah perbukitan

masih terbatas, sementara dusun ini menjadi sasaran program perbaikan RTLH pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris untuk mengevaluasi program tersebut dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup penghuninya, termasuk risiko kesehatan dan keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi faktual rumah di Dusun Pringombo dan membandingkannya dengan standar rumah layak huni yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan kesenjangan antara kondisi eksisting dan standar yang ada, sehingga dapat menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan dan intervensi yang diperlukan. Kajian teoritik menunjukkan bahwa rumah layak huni harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, dan kecukupan ruang. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), indikator rumah layak huni meliputi kecukupan luas tempat

tinggal, akses air minum layak, akses sanitasi layak, serta ketahanan bangunan yang mencakup atap, dinding, dan lantai rumah (S. Di, D. Gunung, 2024).

Penelitian serupa di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi program rumah layak huni sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, dan minimnya partisipasi masyarakat, sebagai contoh studi di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa program rehabilitasi rumah layak huni belum optimal akibat kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat (Mardila Purwanti & Sujianto, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi dalam memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perumahan di Dusun Pringombo dan sejauh mana kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas perumahan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi kondisi faktual rumah di Dusun Pringombo dan membandingkannya dengan standar rumah layak huni yang ditetapkan oleh pemerintah. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data langsung di lapangan. Dusun Pringombo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki variasi kondisi perumahan yang signifikan, sehingga relevan untuk analisis perbandingan antara kondisi

faktual dan standar yang ada. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi rumah di Dusun Pringombo, wawancara dengan pemilik rumah, serta dokumentasi visual. Selain itu, penelitian ini didukung oleh data sekunder dari Bappeda Gunungkidul yang mencatat bahwa terdapat 12 rumah di dusun ini yang tergolong sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi hunian dan kesesuaianya dengan standar rumah layak huni yang ditetapkan oleh pemerintah. Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria rumah dengan ventilasi terbatas dan memiliki potensi perbaikan. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang mencakup:

Tabel 1. Daftar Narasumber

No	Narasumber	Umur	Keterangan
1	N1	58	Pemilik Rumah
2	N2	77	Pemilik Rumah
3	N3	67	Pemilik Rumah
4	N4	63	Pemilik Rumah
5	N5	69	Pemilik Rumah
6	N6	70	Pemilik Rumah
7	N7	62	Pemilik Rumah
8	N8	56	Pemilik Rumah
9	N9	57	Pemilik Rumah
10	N10	70	Pemilik Rumah
11	N11	47	Pemilik Rumah
12	N12	78	Pemilik Rumah

Peneliti menyiapkan pertanyaan yang terstruktur yang mencakup berbagai aspek yang relevan dengan penelitian. Peneliti juga melakukan observasi di

lokasi penelitian untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi rumah dari masing-masing responden dan melakukan wawancara secara tatap muka dengan mengikuti ketersediaan waktu responden. Peneliti mencatat hal-hal yang penting, menarik, atau mencolok yang terjadi di lapangan. Peneliti menganalisis data dengan mengikuti alur kegiatan yang direkomendasikan oleh Miles dan Huberman (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan tahap-tahap ini secara simultan dan berulang. Peneliti juga memastikan keabsahan data dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang didapat dari wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini berfokus pada identifikasi kondisi rumah di Dusun Pringombo dengan membandingkannya dengan standar rumah layak huni yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat tiga aspek utama yang menjadi indikator kelayakan rumah, yaitu keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, dan kecukupan ruang (Kementerian PUPR, 2017).

Kondisi Faktual Rumah di Dusun Pringombo

Studi ini mengidentifikasi kondisi rumah di Dusun Pringombo berdasarkan standar rumah layak huni, meliputi keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, kecukupan ruang, ketersediaan listrik, kamar mandi dan bantuan sosial. Dari hasil analisis terhadap 12 rumah, ditemukan beberapa

hal penting. Pada aspek keselamatan bangunan, mayoritas rumah 66,7% (8 rumah) memiliki tinggi atap depan kurang dari 3 meter. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah belum mampu menyediakan sirkulasi udara yang baik. Kajian yang diterbitkan dalam *Jurnal Arcade* oleh Universitas Kristen Indonesia menyatakan bahwa ketinggian dan sirkulasi udara pada atap mempengaruhi kinerja termal bangunan, di mana atap yang lebih tinggi dapat meningkatkan sirkulasi udara dan memberikan ruang yang lebih luas (Maulida et al., 2024).



Gambar 1. Struktur Tidak Memenuhi Standar



Gambar 2. Struktur Memenuhi Standar

Sementara itu, hanya 33,3% (4 rumah) yang memiliki tinggi atap minimal 3 meter, mendekati standar kenyamanan dan keselamatan. Tinggi atap yang memadai berperan penting dalam memastikan sirkulasi udara yang baik dan kenyamanan termal bagi penghuni, meskipun tidak ada standar baku yang menetapkan tinggi atap depan minimal 3 meter, beberapa sumber memberikan rekomendasi terkait ketinggian plafon atau atap untuk

mencapai kenyamanan dan keselamatan penghuni. Misalnya, penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Virtuvian* oleh Universitas Mercu Buana menyebutkan bahwa struktur bentuk atap yang tinggi dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni dalam bertempat tinggal (Darma, 2020). Selain itu, rekomendasikan pemasangan plafon minimal 2,7 meter di atas lantai, atau 3 meter jika ada kipas angin di plafon, untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan kenyamanan termal (Sipil et al., 2023). Dengan demikian, meskipun angka 3 meter bukanlah standar mutlak, ketinggian atap yang lebih tinggi umumnya dianggap mendukung sirkulasi udara yang lebih baik dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan penghuni.

Kemudian ada kesehatan lingkungan, dievaluasi melalui sumber air yang digunakan. Sebanyak 83,3% (10 rumah) di Dusun Pringombo mengandalkan sumber air dari PAM-Dus, yang menunjukkan akses yang cukup baik terhadap air bersih terkelola. Namun, 16,7% (2 rumah) masih menggunakan sumur atau sumber mata air, yang kualitasnya mungkin belum memenuhi standar kesehatan. Standar kualitas air untuk sumber mata air dan sumur di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang mencakup aspek fisik, kimia, dan mikrobiologi (Kemenkes, 2023). Air yang layak konsumsi harus tidak berwarna, tidak keruh, tidak berbau, dan tidak berasa.



Gambar 3. PAM-Dus



Gambar 4. Mata Air

Dan dari segi kecukupan ruang, mayoritas rumah 66,7% (8 rumah) memiliki luas lebih dari 50 m², sesuai dengan standar minimum per rumah tangga. Namun, masih terdapat 33,3% (4 rumah) yang memiliki luas kurang dari 50 m², sehingga belum memenuhi standar untuk mendukung kenyamanan dan aktivitas penghuni. Penelitian menunjukkan bahwa rumah dengan luas lebih dari 50 m² lebih mampu memenuhi kebutuhan ruang yang beragam, baik untuk kebutuhan privat maupun sosial penghuni, serta mendukung kenyamanan dalam menjalani aktivitas rumah tangga yang lebih kompleks. Sebaliknya, rumah dengan luas kurang dari 50 m² dapat membatasi fungsi ruang, mengurangi sirkulasi udara yang optimal, dan membatasi ruang untuk kegiatan sosial keluarga, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas hidup penghuni (Putra & Hakim, 2021).



Gambar 5. Tata Ruang Tidak Memenuhi Standar

Dalam aspek ketersediaan listrik, sebagian besar rumah (83,3%) menggunakan daya 450 watt, yang mencukupi untuk kebutuhan dasar. Namun, 16,7% rumah lainnya bergantung pada listrik sambungan dari sumber lain, yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan listrik. Dan dari hasil survei terhadap 12 rumah di Dusun Pringombo, terdapat 8 rumah yang memiliki fasilitas kamar mandi yang tidak layak. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaklayakan ini antara lain kurangnya akses terhadap air bersih, pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik, dan kondisi fisik kamar mandi yang kurang mendukung kenyamanan serta kebersihan penghuni. Fasilitas kamar mandi yang layak dalam rumah layak huni harus memenuhi kriteria kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.



Gambar 6. Listrik PLN

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Permukiman* oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan ruang

rumah tapak berdasarkan SNI 03-1979-1990 meliputi ruang mandi dan kakus yang memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan (Suryo, 2017). Selain itu, penelitian lain yang dipublikasikan dalam *Jurnal Sains dan Aplikasi Teknologi* menekankan pentingnya kamar mandi dengan desain yang memadai untuk kemudahan dan penggunaan yang mandiri, termasuk bagi pengguna dengan disabilitas (Harahap, 2021). Dengan memenuhi kriteria ini, fasilitas kamar mandi dapat mendukung kesehatan dan kenyamanan penghuni rumah.



Gambar 7. Sanitasi Sesuai Standar



Gambar 8. Sanitasi Tidak Sesuai Standar

Terakhir, dalam hal bantuan sosial, 66,7% (8 rumah) menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 33,3% (4 rumah) lainnya menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sembako sebagai tambahan dukungan.

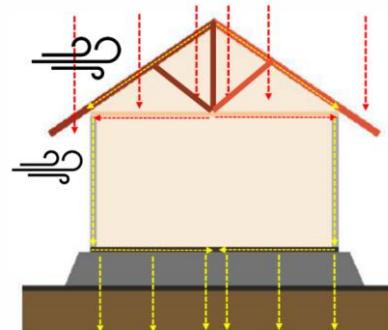
Standar Rumah Layak Huni

Berikutnya adalah pembahasan tentang standar rumah layak huni yang dimana menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang standar rumah layak huni harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, kecukupan ruang, dan kamar mandi. Yang dimana semoga tulisan ini bisa menjadi acuan untuk kedepannya dalam membangun rumah layak huni tidak hanya di Dusun Pringombo tetapi juga di wilayah lainnya.

Yang pertama Keselamatan Bangunan, peneliti disini mengambil contoh Dusun Pringombo yang terletak di kawasan perbukitan, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor keselamatan bangunan sebelum memulai pembangunan. Mengingat potensi terjadinya longsor di daerah tersebut, disarankan untuk tidak mendirikan bangunan di area yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam seperti longsor. Pemerintah dan masyarakat setempat perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi daerah yang aman untuk pembangunan, guna menghindari kerugian dan memastikan keselamatan penghuni bangunan di masa depan. Selain itu, mengingat kondisi geografis yang rentan terhadap longsor, analisis kondisi tanah secara menyeluruh menjadi hal yang sangat penting sebelum memulai pembangunan. Prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keselamatan jangka panjang harus diutamakan untuk mencegah terjadinya bencana yang merugikan masyarakat.

Pada pembangunan yang memenuhi syarat keselamatan, penting untuk memastikan bahwa setiap bagian konstruksi mulai dari atap (penutup atap, kuda-kuda atap, plafon, ring balok), badan (penutup dinding, kolom, kusen), kaki (pondasi, sloof, penutup lantai).

Dirancang dan dibangun dengan memperhatikan beban yang diterimanya, sehingga tidak mudah roboh atau terpengaruh oleh kondisi cuaca ekstrem.



Gambar 9. Pemetaan Penyaluran Beban

Badan bangunan sebagai struktur utama, harus didesain dengan memperhitungkan kekuatan material yang digunakan dan didistribusi beban secara merata. Sementara itu, bagian kaki bangunan harus dilengkapi dengan pondasi yang kokoh, bisa menggunakan pondasi batu kali yang biasanya dipakai pada rumah, menggunakan batu belah dan kasar. Sloof adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Berfungsi untuk mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi, sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Selain itu sloof juga berfungsi sebagai pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh apabila terjadi pergerakan tanah. Penggunaan sloof pada bangunan di daerah perbukitan harus dirancang dengan teliti.

Lantai adalah bagian penting dari sebuah bangunan yang berfungsi sebagai alas sehari-hari. Di daerah perbukitan seperti Dusun Pringombo, lantai sebaiknya dibuat dari material yang sederhana namun kuat, seperti cor semen atau tegel. Material ini cukup tahan terhadap cuaca dan pergerakan tanah. Agar lantai tetap stabil, pastikan permukaan tanah di bawahnya rata dan

padat. Selain itu, lantai juga perlu sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari genangan air yang bisa merusak bangunan. Kemudian untuk dinding dapat dibuat dari material seperti batu bata dan batako. Dan juga kolom bangunan yang fungsinya juga tidak beda dari sloof yakni penerus beban seluruh bangunan ke pondasi.

Atap rumah harus menggunakan material yang tahan lama dan dapat menahan beban dengan baik, seperti genteng tanah liat, genteng beton, atau seng. Serta dirancang dengan kemiringan yang cukup agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Kuda-kuda sebagai rangka penopang atap harus terbuat dari material yang kuat, seperti kayu kering atau baja ringan, dengan pemasangan yang sesuai standar agar bisa mendistribusikan beban yang merata. Plafon rumah juga harus dipasang pada ketinggian 3 meter dari lantai, menggunakan material seperti gypsum atau plafon PVC untuk memberikan kenyamanan serta sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan. Ring balok yang terbuat dari beton bertulang berfungsi untuk menghubungkan dinding dengan atap, menjaga kestabilan bangunan dan memastikan atap terpasang dengan aman dan kokoh, jika letak dari ring balok terlalu rendah maka udara yang ada di dalam bangunan akan terasa panas, maka dari itu letak ring balok adalah 3m – 3,5m untuk orang indonesia.

Yang kedua ada Kecukupan Luas Minimum Bangunan, di Indonesia, standar luas lahan yang dibutuhkan adalah 60 m², sementara standar luas bangunan minimal adalah 36 m². Selain itu, setiap individu memerlukan ruang dengan standar volume minimal 3 meter x 3 meter x 2,8 meter, yang setara dengan 25 m³. Standar ini didasarkan pada Keputusan Menteri (KEPMEN) 403 Tahun 2002, yang mengatur kebutuhan minimum agar rumah dapat

dikategorikan layak huni. Penjelasan ini bertujuan agar masyarakat memahami kebutuhan luas ruang untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan penghuni rumah.

Rumah layak huni membutuhkan pencahayaan, penghawaan, dan pengaturan suhu udara yang baik. Sinar matahari pagi harus masuk melalui jendela untuk menjaga kesehatan penghuni, serta panas yang terperangkap perlu dikeluarkan melalui ventilasi seperti lubang berukuran 20 cm x 20 cm di atap. Udara segar juga harus masuk dengan lancar melalui jendela yang memiliki luas bukaan minimal 1/9 dari luas lantai ruangan, sehingga rumah menjadi sejuk, nyaman, dan sehat. Selain itu, lantai rumah harus memiliki ketinggian minimal 25 cm dari jalan dan 10 cm dari halaman untuk mencegah kelembaban dan banjir demi menjaga kondisi rumah tetap nyaman dan aman.

Dan terakhir ada Kamar mandi yang sehat dan nyaman harus memiliki dimensi yang sesuai, yaitu panjang 140 cm dan lebar 80 cm, dengan lantai lebih rendah 3 cm dari lantai luar untuk mencegah air keluar. Selain itu, saluran toilet dan air kotor harus dipisahkan agar tidak bercampur. Untuk sistem septic tank yang baik, diperlukan galian dengan kedalaman 1,5 meter, lebar 1,3 meter, dan panjang 2,2 meter, dengan dinding bata yang diplester. Septic tank dibagi menjadi dua ruang, yaitu ruang pertama untuk limbah padat dan ruang kedua untuk cairan, dengan pembatas yang dilengkapi lubang kecil untuk resapan. Pipa WC harus berdiameter 4 inci dengan kemiringan 2% agar limbah mengalir lancar, dan saluran udara wajib disediakan untuk mencegah akumulasi gas berbahaya. Dengan perencanaan sanitasi yang baik seperti ini, rumah sehat dapat terwujud, memberikan

kenyamanan bagi penghuni serta menjaga kebersihan lingkungan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengidentifikasi permasalahan utama yang terkait dengan rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya di wilayah Dusun Pringombo. Temuan yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam merancang program dan kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas hunian. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan program perbaikan RTLH tidak hanya menyelesaikan permasalahan fisik rumah, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan. Ke depannya, penelitian lanjutan yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk memperkaya pemahaman dan memberikan solusi yang lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa rumah di Dusun Pringombo belum sepenuhnya memenuhi standar rumah layak huni yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam aspek keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, dan kecukupan ruang. Beberapa temuan utama menunjukkan bahwa tinggi atap, akses air bersih, luas bangunan, serta kondisi kamar mandi masih menjadi permasalahan signifikan yang berdampak pada kualitas hidup penghuni. Meskipun sebagian besar rumah telah memiliki akses listrik dan beberapa menerima bantuan sosial, aspek-aspek fisik rumah seperti ventilasi dan struktur bangunan masih membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai standar rumah layak huni dan minimnya intervensi berbasis lokal menjadi hambatan dalam implementasi program rehabilitasi rumah. Selain itu, lokasi Dusun Pringombo yang berada di daerah perbukitan menambah tantangan dalam pembangunan rumah yang sesuai dengan prinsip keselamatan.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar melibatkan sampel yang lebih besar dengan variasi karakteristik rumah yang lebih luas. Pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan juga penting untuk memberikan gambaran yang lebih holistik. Agenda penelitian berikutnya dapat berfokus pada perancangan intervensi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya standar rumah layak huni. Implementasi program percontohan berbasis teknologi bangunan sederhana juga dapat menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah perbukitan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Darma, K. A. S. (2020). Prinsip Pengendalian Pasif Fisika Bangunan Rumah Tradisional Bale Saka Roras. *Vitruvian*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.22441/vitruvian.2020.v9i2.005>
2. Di, S., Gunung, D., Kecamatan, S., Kabupaten, B., Utara, B., Upe, A., & Jabar, A. S. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU 322 ribu jiwa , angak ini meningkat sebesar 12 ribu jiwa di bandingkan tahun 2022 . mencukupi kebutuhan*

- pokok sehingga kurang mampu untuk menjansin perumahan layak huni untuk mas. 5(1), 89–98.*
3. Harahap, T. (2021). Komparasi Indikator Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh Indonesia. *Journal of Science and Applicative Technology*, 5(1), 163. <https://doi.org/10.35472/jsat.v5i1.426>
 4. Kemenkes. (2023). *Laporan Tahunan : Pengamanan Kualitas Air Minum Tahun 2022*.
 5. Kementerian PUPR. (2017). *Rumah Layak Huni*.
 6. Keputusan Menteri (KEPMEN) 403 Tahun 2002: Kecukupan Luas Minimum Bangunan.
 7. Mardila Purwanti, O., & Sujianto. (2023). Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kota Pekanbaru. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 35–41. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.949>
 8. Maulida, A., Shofie, T., Prianto, E., & Semarang, U. D. (2024). *KETANGGUHAN TERMAL : MENGANALISIS*. 171–177.
 9. Miles, M.B, Huberman, A.M., Saldana, J. (2014). Qualitative-Data-Analysis, A Method Sourcebook. Sage.
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang standar rumah layak huni
 12. Putra, H. M. A., & Hakim, B. R. (2021). Analisis Luas Bangunan Dan Faktor Sekunder Penentu Kenyamanan Rumah Tinggal Sederhana. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 5(1), 52. <https://doi.org/10.31848/arcade.v5i1.608>
 13. S. Di, D. Gunung, S. K. et al. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU 322 ribu jiwa , angak ini meningkat sebesar 12 ribu jiwa di bandingkan tahun 2022 . mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjansin perumahan layak huni untuk mas. 5(1), 89–98.* <https://welvaart.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/9>
 14. Sari, A. G. P. (2022). Strategi Pembangunan Rumah Layak Huni (Rulahu) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 278–292. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i2.2843>
 15. Sipil, J. T., Teknik, F., & Malikussaleh, U. (2023). *Kajian besar dan perabotan pada*.
 16. Suryo, M. S. (2017). Analisa Kebutuhan Luas Minimal Pola Rumah Sederhana Tapak Di Indonesia. *Jurnal Permukiman*, 12(2), 116. <https://doi.org/10.31815/jp.2017.12.1.16-123>